

**PENGUATAN KAPASITAS FORUM KOMUNIKASI WARGA DALAM
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI KABUPATEN BANDUNG**

Joko Harsanto¹, Wawan Heryana², dan Nurjanah²

¹Panti Sosial Bina Remaja “Naibonat” Kupang

²Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

E-mail: jokoharsantontt@gmail.com

Abstract

This research aims to develop a model of strengthening the capacity of the residents communication forum of RW 04 in handling social conflicts. The research also proved that the cause of social conflict in RW 04, Ciburial village with Erginn Cafe parties in accordance with the theory of public relations, which assumed that the conflict caused by the ongoing polarization, mistrust and hostility between different groups in a society. The research method used qualitative research whereas the type is action research. Data resource used in this research gained from interview, participative observation, focus group discussion, documentation study, ToP (Technology of Participation), and organization capacity research result. The interventions performed in this research were organization work plan making, management and administration training, conflict management training, social advocacy and training to build network in handling social conflict. The intervention result proved to strengthen RW 04 residents communication forum capacity in making program, management and administration plan, build network with social conflict agency and conflict management also social advocacy.

Keywords: capacity building, residents communication forum, social conflict handling

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model penguatan kapasitas forum komunikasi warga RW 04 dalam penanganan konflik sosial. Penelitian ini juga membuktikan bahwa penyebab konflik sosial di RW 04 Desa Ciburial dengan pihak kafe Erginn sesuai dengan teori hubungan masyarakat yang berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dan jenis penelitiannya tindakan. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara, observasi partisipatif, diskusi kelompok terfokus, studi dokumentasi, ToP (*Technology of Participation*), penilaian kapasitas (PEKA) organisasi. Intervensi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pelatihan pembuatan rencana kerja organisasi: pelatihan manajemen dan administrasi, pelatihan manajemen konflik dan advokasi sosial, dan pelatihan membangun jejaring kerja dalam penanganan konflik sosial. Hasil intervensi ini terbukti dapat menguatkan kapasitas forum komunikasi warga RW 04 dalam membuat rencana program, manajemen dan administrasi, membangun jejaring kerja dengan lembaga penanganan konflik sosial serta manajemen konflik dan advokasi sosial.

Kata kunci: forum komunikasi warga, penanganan konflik sosial, penguatan kapasitas

Pendahuluan

Hampir semua bencana alam dan bencana sosial di dunia telah terjadi di Indonesia seperti; gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, kerusuhan /konflik sosial baik secara vertikal maupun horizontal. Setiap terjadi bencana alam dan sosial selalu menimbulkan korban harta dan jiwa yang telah menyisakan penderitaan yang amat memilukan bagi para korban, selain kehilangan harta benda, ribuan nyawa melayang. Kehilangan akibat bencana tersebut akan menimbulkan konsekuensi berat untuk bertahan hidup, martabat dan penghidupan baik secara individu atau berkelompok.

Berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dari konflik yang pernah terjadi sejak tahun 1990-2005, terdapat masalah yang berdampak pada munculnya konflik, yaitu: 1) Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, 2) Masalah kepemilikan tanah dan benturan dengan dengan perusahaan-perusahaan swasta di daerah, 3) Masalah pengungsi yang tidak kunjung terselesaikan, 4) Konflik akibat pergeseran bias agama, ras, suku menjadi bias etnik ditataran akar rumput, 5) Masih seringnya elit politik menggunakan isu etnis dan adat untuk menumbuhkan sentimen tertentu termasuk politisasi masalah keagamaan dikalangan birokrat, 6) Lemahnya aspek penegakan hukum, khususnya dalam konflik dan sumber daya sosial/konflik, 7) Marak dan tingginya tingkat korupsi di birokrasi, 8) Segresi sosial dan sektarianisme yang kadang-kadang justru dimotori oleh lembaga keagamaan setempat.

Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Payne (1997) berkisar antara: 1) *welfarist communalism*, yaitu konflik yang terjadi karena kecemburuan sosial akibat distribusi sumber daya yang tidak dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, 2) *retaliatory communalism*, yakni konflik yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan antar komunitas, dan 3) *separatist*

communalism, yakni konflik vertikal dengan adanya gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan diri secara politik.

Berdasarkan data di wilayah hukum Polda Jabar Tahun 2015 ada sekitar 156 potensi konflik dengan perincian sebanyak 87 masalah poleksosbud-hankam, 45 masalah SARA, 5 masalah batas wilayah dan 19 masalah sumber daya alam. Berdasarkan data dari KESBANGPOL Kabupaten Bandung untuk kegiatan unjuk rasa tahun 2015 berjumlah 35 kasus serta potensi konflik sosial di tahun 2015 berjumlah 19 kasus. Selain itu juga data dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung untuk potensi konflik di tahun 2015 terdapat 5 (lima) lokasi di Desa Buah Batu Kecamatan Bojong Soang, Desa Ciaso Kecamatan Nagreg, Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi, Desa Lingkar Kecamatan Rancaekek dan Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan.

Berdasarkan hasil asesmen awal pada saat penelitian diketahui bahwa bencana konflik sosial horizontal telah terjadi antara masyarakat RW 4 dengan pengusaha Kafe Erginn. Penyebab konflik sosial tersebut karena pihak Kafe Erginn dalam usahanya telah melanggar perijinan. Permasalahan konflik sosial antara masyarakat RW 04 Desa Ciburial dengan pihak Kafe Erginn belum selesai dan belum ada solusi yang terbaik. Berdasarkan hasil asesmen lanjutan didapatkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat RW.04 adalah kurangnya kontrol sosial.

Untuk meningkatkan kontrol sosial masyarakat maka dilakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan pembekalan atau pelatihan warga tentang pendidikan perdamaian/resolusi konflik dan manajemen konflik, 2) Pelatihan advokasi hukum oleh praktisi hukum dari LBH Kota Bandung dengan berdiskusi dan tukar pengalaman tentang kasus hukum yang pernah ditangani, 3) Pembentukan Forum Komunikasi Warga (FKW) RW 04 Desa Ciburial dalam penanganan konflik sosial.

Berdasarkan kegiatan tersebut di atas bahwa kontrol sosial masyarakat RW 04 dalam kegiatan di atas sudah mulai meningkat. Hal tersebut dilihat dari: 1) Masyarakat mengerti dan memahami dalam menghadapi konflik, manajemen konflik serta mendapatkan pengetahuan tentang pendidikan perdamaian/resolusi konflik, (2) Mendapatkan semangat dan dukungan dari pihak LBH Kota Bandung serta penanganan konflik sosial yang berkelanjutan, 3) Masyarakat memiliki wadah untuk melakukan perjuangan dan pembelaan hak-hak warga yang terabaikan serta dapat bersatupadu/kompak dalam organisasi ini untuk mencapai suatu tujuan, (4) Meningkatnya kontrol sosial masyarakat dalam penanganan konflik sosial.

Setelah kegiatan penelitian selesai peneliti melakukan reasesmen terhadap pengurus "FKW" RW 04 dan perwakilan warga masyarakat RW 04 Desa Ciburial. Ditemukan bahwa kegiatan penanganan konflik sosial yang dilakukan oleh "FKW" RW 04 belum dapat dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari: 1) Forum komunikasi warga RW 04 belum fokus dalam penanganan konflik sosial, 2) Visi, misi dan struktur organisasi yang belum dinyatakan secara tertulis dalam organisasi, 3) Sumber daya manusia, kepengurusan, dan hubungan kerja yang belum jelas sehingga menyebabkan belum tersedianya pembagian kerja antar bidang, 4) Belum melibatkan potensi lokal budaya sebagai sumber damai yang merupakan kearifan lokal dan ketahanan sosial masyarakat dalam penanganan konflik sosial, 5) Kurangnya kualitas pengetahuan sumber daya manusia baik pengetahuan dan keterampilan berorganisasinya dimana jumlah pengurus dari 11 orang yang aktif hanya 3 orang pengurus.

Peneliti mengarahkan pada penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini difokuskan pada penguatan kapasitas dan manajemen organisasi, dengan hasil yang diharapkan bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial, dan bertujuan untuk meningkatkan kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan para pengurus organisasi guna mempersiapkan,

merencanakan, dan melaksanakan program dalam penanganan konflik sosial. Hasil dari penguatan kapasitas organisasi tersebut diharapkan forum komunikasi warga "FKW" RW 04 mempunyai model penguatan kapasitas dan peningkatan kapasitas forum komunikasi warga "FKW" RW 04 dalam melaksanakan kegiatannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *Bagaimana Penguatan Kapasitas "FKW" dalam Penanganan Konflik Sosial di RW 04 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung?* Selanjutnya dapat dijabarkan ke dalam sub-sub problematik penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana profil forum komunikasi warga RW 04 Desa Ciburial dalam penanganan konflik sosial? 2) Bagaimana aktivitas forum komunikasi warga RW 04 Desa Ciburial dalam penanganan konflik sosial pada tahapan pencegahan dan penghentian konflik sosial? 3) Bagaimana rancangan model penguatan forum komunikasi warga RW 04 Desa Ciburial dalam penanganan konflik sosial? 4) Bagaimana implementasi model penguatan forum komunikasi warga RW 04 Desa Ciburial dalam penanganan konflik sosial? 5) Bagaimana hasil implementasi model forum komunikasi warga RW 04 Desa Ciburial dalam penanganan konflik sosial? 6) Bagaimana model akhir penguatan forum komunikasi warga RW 04 Desa Ciburial dalam penanganan konflik sosial?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mendapatkan gambaran tentang struktur, tugas dan fungsi, kegiatan, penguatan SDM dan dukungan warga terhadap "FKW" RW 04 Desa Ciburial, 2) Untuk mengetahui aktifitas forum komunikasi warga RW 04 Desa Ciburial dalam penanganan konflik sosial pada tahapan pencegahan dan penghentian, 3) Untuk merancang model penguatan forum komunikasi warga RW 04 Desa Ciburial melalui strategi, teknik, fungsi dan peran pekerja sosial dalam penanganan konflik sosial, 4) Untuk mendapatkan gambaran implementasi model penguatan forum komunikasi warga RW 04 dalam dalam penanganan konflik sosial, 5) Untuk mendapatkan gambaran hasil model

penguatan forum komunikasi warga RW 04 Desa Ciburial dalam penanganan konflik sosial, 6) Untuk menghasilkan model akhir penguatan forum komunikasi warga RW 04 Desa Ciburial dalam penanganan konflik sosial.

Keterbatasan penelitian, aktivitas yang akan dilakukan dalam penelitian ini terbatas pada penguatan forum komunikasi warga dalam penanganan konflik sosial di RW 04 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Keterbatasan penelitian ini tidak bisa digeneralisir pada semua organisasi sosial baik yang berada di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan atau organisasi sosial diluar lokasi penelitian, tetapi hanya pada FKW RW 04 saja dan terbatas hanya pada anggota pengurus FKW berjumlah 14 orang saja. FKW bersifat ad.hoc yang artinya keberadaannya bertugas khusus untuk menyelesaikan konflik sosial antara warga RW 04 dengan kafe Erginn dan tidak bisa untuk menyelesaikan permasalahan sosial lainnya yang berada di Desa Ciburial.

Penguatan kapasitas menurut WHO dalam Anneli Milen (2006) mencakup 4 (empat) dimensi yaitu: 1) Dimensi kapabilitas manusia dan institusional berkaitan dengan staf atau pegawai yang dimiliki organisasi, lembaga atau institusi, 2) Dimensi kapabilitas perencanaan dan pelaksanaan menunjuk pada pentingnya hubungan yang kuat antara kebijakan, rencana serta pelaksanaan tetapi jangan berlebihan, 3) Dimensi mikro dan makro menunjuk pada perlunya mengetahui kapasitas dengan relevansi yang relevan, 4) Dimensi kognitif versus dimensi praktis menunjuk pada perlunya memperluas penguatan kapasitas yang bukan sekedar pelatihan formal dan informal.

Penguatan adalah suatu proses upaya sistematis menjadikan lembaga dalam suatu masyarakat menjadi lebih baik, dinamis, berdaya dan kuat dalam menghadapi berbagai pemenuhan kebutuhan dan tantangan atau hambatan yang dapat mempengaruhi eksistensinya. Penguatan kapasitas (*capacity building*) tidak dapat dipisahkan dari pengertian kapasitas atau kemampuan

(*capacity*) peningkatan kemampuan dan potensi yang ada dalam diri anggota komunitas itulah yang dikenal dengan penguatan kapasitas (*capacity building*) kerangka kerja, tingkatan dan dimensi dalam penguatan kapasitas menunjuk adanya keterkaitan satu sama lain

Menurut Sumpeno (2002), penguatan kapasitas adalah suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Penguatan kapasitas adalah perubahan perilaku untuk: 1) Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap, 2) Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen, finansial dan kultur, 3) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan dan mengantisipasi perubahan.

Mengacu pendapat tersebut di atas, terdapat dua faktor penting dalam mencapai tujuan penguatan kapasitas bagi pengurus Forum Komunika Warga RW 04 Desa Ciburial, yakni: 1) Adanya perubahan perilaku atas peningkatan kemampuan kepemimpinan, kepengurusan dan keanggotaan, serta terhadap meningkatnya pemahaman dalam penanganan konflik sosial di RW 04 Desa Ciburial Kabupaten Bandung, 2) Strategi dalam penguatan kelembagaan untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan dan hak warga. Strategi penyampaian aspirasi melalui negosiasi dan pendekatan persuasif merupakan pilihan tepat saat ini, karena tanpa harus terprovokasi menyampaikan pendapat melalui pengerahan massa sehingga mengeleminir terjadinya anarkisme dalam memperjuangkan hak-hak warga RW 04 Desa Ciburial. Forum komunikasi warga RW 04 Desa Ciburial memiliki kebebasan untuk menentukan kebutuhan organisasinya dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penguatan kapasitas adalah mencakup penguatan kapasitas institusi dan kapasitas sumber daya manusia.

Forum komunikasi warga RW 04 merupakan organisasi sosial. Organisasi didefinisikan sebagai sekelompok individu yang berkumpul secara bersama-sama, untuk menyampaikan suatu tujuan yang khusus dalam organisasi kemasyarakatan yang memiliki orientasi untuk memperbaiki kualitas kehidupan anggotanya. Salah satu keuntungan dari organisasi adalah bahwa individu yang bekerja secara bersama dapat menyelesaikan lebih banyak daripada individu bekerja secara perorangan.

Forum komunikasi warga RW 04 Desa Ciburial dapat digolongkan sebagai organisasi sektor partisipatori, disebut demikian karena sebagai organisasi lokal yang berbasis masyarakat memiliki pusat hubungan yang berkelanjutan antar orang yang dibangun atas dasar persahabatan dan loyalitas. Selain itu kemampuan organisasi dalam komunitas terletak pada solidaritas yang tinggi diantara anggotanya. Menurut Nasdian (2003) dalam konteks sosio budaya, hubungan yang dijalin melalui kekerabatan dan kebersamaan dalam masyarakat dapat dikelola untuk memecahkan masalah-masalah sosial atau mengembangkan kegiatan sektor sosial, misalnya dalam mengatasi masalah sosial, kematian, gotong royong, pengajian, pencegahan penanggulangan bencana alam dan sosial.

Upaya forum komunikasi warga RW 04 Desa Ciburial dalam penanganan konflik sosial di masyarakat RW 04 Desa Ciburial dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang manajemen konflik. Berdasarkan hal tersebut, pekerja sosial sebagai salah satu tenaga profesional tentunya memiliki relevansi dengan masalah-masalah sosial termasuk diantaranya adalah masalah bencana sosial konflik. Hal ini dikarenakan pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan keberfungsian sosial serta menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan orang dapat mencapai tujuan hidupnya. Selain itu profesi pekerjaan sosial merupakan profesi yang digeluti oleh seseorang untuk meringankan beban orang lain agar dapat meningkatkan keberfungsian seseorang.

Menurut Soetarso (1992) pengertian pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

“Pekerjaan sosial adalah suatu bidang keahlian yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi-interaksi diantara orang dengan lingkungan sosialnya sehingga orang ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka, membantu mengatasi kesulitan-kesulitan, serta mewujudkan aspirasi-aspirasi dan nilai-nilai mereka”.

Intervensi makro merupakan bentuk intervensi langsung yang dirancang dalam rangka melakukan perubahan secara terencana pada tingkat organisasi dan komunitas (Netting,2004). Menurut Ife (1995), jika tidak ada kebutuhan bersama itu bukan suatu komunitas. Jadi, komunitas adalah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama, baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Intervensi makro merupakan suatu metode praktik profesional untuk mengubah sistem sasaran yang berada di atas individu, kelompok, dan keluarga. Sistem sasaran tersebut antara lain adalah organisasi, masyarakat tingkat lokal, regional, maupun nasional. Intervensi makro ini terutama berkaitan dengan aktivitas pertolongan manusia yang berada di luar dimensi klinis, akan tetapi lebih difokuskan kepada pendekatan sosial yang luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kehidupan yang lebih baik di masyarakat. (Rothman dan Tropman 1987). Masalah sosial yang dimaksud dalam pengertian tersebut termasuk masalah bencana sosial/konflik sosial, bahaya yang ditimbulkan oleh konflik sosial tidak saja merugikan secara individu tetapi juga merugikan keluarga, lingkungan serta ancaman bagi eksistensi stabilitas nasional.

Relevansi profesi pekerjaan sosial dengan forum komunikasi warga RW 04 Desa Ciburial adalah pekerja sosial sebagai profesi pertolongan berperan memberikan pertolongan kepada individu, keluarga dan masyarakat, forum komunikasi warga RW 04 Desa Ciburial, agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya, antara lain menolong

masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri, menghubungkan individu-individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan dengan pelayanan masyarakat, menyediakan informasi dan memberikan saran-saran dalam berbagai area, dan keterlibatan dalam tugas-tugas pengembangan dan pengimplementasian program forum komunikasi warga RW 04 Desa Ciburial.

Pekerja sosial bidang pengungsi dan bencana sosial/konflik sosial pada setting komunitas mempunyai peran sama pentingnya dengan setting klinis. Pekerja sosial komunitas lebih menekankan kepada level makro atau bekerja dengan masyarakat, organisasi dan kebijakan. Netting (2004) mengatakan bahwa ada beberapa cara yang dapat diperankan oleh pekerja sosial untuk membangun dukungan perubahan pada tingkat makro, diantaranya: a) Mendesain intervensi, b) Membangun dukungan, c) Mengukur kesiapan sistem untuk perubahan, d) Memilih pendekatan untuk perubahan.

Secara lebih spesifik Skidmore (1995:46-47) menyatakan bahwa tindakan yang efektif bagi pekerja sosial dalam administrasi harus mengikuti kaidah sebagai berikut:

“Modern social work emphasizes the significant role of the administrator in the delivery of effective social services. The administrator in the delivery of effective social services. The administrator must know basic administrative processes to understand human behavior, formulate social policies, and encourage skillful social work practice. Professional attitudes of social work administrators are particularly significant in providing an emotional climate conducive to the effective delivery of social services. Specific actions of effective social work administrators are numerous and include the following: accepting, caring, creating, democratizing, trusting, approving, maintaining, equilibrium, organizing, setting priorities, delegating, interacting with community and professional persons, decision making, facilitating, communicating, timing, building, and motivating. The 1990 NASW code of Ethics is a helpful guide for administrators and workers-it outlines, and defines ethical principles in their daily work”.

“Pekerjaan sosial modern menekankan peran penting dari administrator dalam pemberian layanan sosial yang efektif. Praktik pekerja sosial administrator yang mendasar harus memahami perilaku manusia, merumuskan kebijakan sosial, dan mendorong praktik kerja sosial secara terampil. Sikap profesional administrator pekerjaan sosial khususnya yang signifikan dalam memberikan iklim emosional yang kondusif bagi pelayanan sosial yang efektif.

Tindakan spesifik dari administrator pekerjaan sosial yang efektif banyak dan meliputi: menerima, peduli, menciptakan, demokratisasi, percaya, menyetujui, memelihara, keseimbangan, pengorganisasian, penetapan prioritas, mendelegasikan, berinteraksi dengan masyarakat dan orang-orang profesional, pengambilan keputusan, memfasilitasi, berkomunikasi, waktu, dan membangun memotivasi. The 1990 NASW Kode Etik adalah panduan bermanfaat untuk administrator dan pekerja-menjabarkan dan mendefinisikan prinsip-prinsip etika dalam pekerjaan sehari-hari mereka”.

Peran pekerja Sosial dalam setting organisasi tidak bisa dilepaskan dari tujuan profesi pekerjaan sosial. Menurut Pincus and Minahan dalam Andrew Jones dan John May (1992:15-16) mendefinisikan tujuan dari profesi pertolongan pekerjaan sosial adalah:

Social work is concerned with the interactions between people and their social environment which affect the ability of people to accomplish their life tasks, alleviate distress, and realize their aspirations and values. The purpose of social work therefore is to 1) enhance the problem-solving and coping capacity of people, 2) link people with systems that provide them with resources, services, and opportunities, 3) promote the effective and humane operation of these systems, and 4) contribute to the development and improvement of social policy (1973,9)

Pekerjaan sosial berkaitan dengan interaksi antara manusia dan lingkungan sosialnya yang mempengaruhi kemampuan orang untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka, mengurangi tekanan, dan menyadari aspirasi dan nilai-nilai mereka. Tujuan dari pekerja sosial itu adalah: 1) meningkatkan kemampuan dan kapasitas orang dalam mengatasi dan memecahkan masalah, 2) menghubungkan orang dengan sistem sumber, pelayanan dan menciptakan peluang, 3) meningkatkan

efektifitas keberfungsian manusia dan sistem, dan 4) memberikan kontribusi bagi pengembangan dan peningkatan kebijakan sosial (1973:9).

Dalam upaya membangun dukungan pada tingkat mikro menggunakan strategi *Community Development* yaitu: 1) Kolaborasi "*Colaboration*". Kolaborasi dapat digunakan ketika relasi antara sistem sasaran dan kegiatan secara bersama dapat membentuk persetujuan secara kolektif untuk menggali perubahan. Taktik pada situasi ini adalah implementasi dan membangun kapasitas. 2) Kontes. Kontes dapat menjadi alternatif ketika terjadi perbedaan pendapat atau pertentangan antara sistem sasaran dan sistem kegiatan. Negoisasi dan bergaining mengacu pada situasi dimana sistem sasaran dan tindakan bertentangan satu dengan yang lain. Teknik ini digunakan dalam kondisi atau situasi yang lebih formal dibanding persuasi dan biasanya melibatkan mediator sebagai pihak ketiga.

Peran pekerja sosial dalam penguatan kapasitas untuk melakukan pencapaian tujuan organisasi telah mengikuti kaidah yang sudah dinyatakan oleh Skidmore sebagaimana dinyatakan di atas dan secara lebih komprehensif dituangkan dalam NASW kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap pekerja sosial.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 ayat 1). Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. (Pasal 1 Ayat 4).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial menjelaskan bahwa konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Selanjutnya dalam Pasal 1 menjelaskan Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik.

Kegiatan yang dilakukan pada penanganan konflik sosial ini terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu: 1) Tahap pencegahan konflik. Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini, 2) Tahap penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, penyelamatan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda, 3) Tahap pemulihan pascakonflik. Tahap pemulihan pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial pasal 5 bahwa konflik dapat bersumber dari: 1) Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya, 2) Perseteruan antarumat beragama dan /atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis, 3) Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota dan/atau provinsi 4) Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; dan atau 5)

Distribusi sumber daya alam yang tidak berimbang dalam masyarakat.

Teori-teori penyebab konflik menurut Fisher (2001:8) sebagai berikut: 1) Teori Hubungan Masyarakat. Menurut teori ini konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik dan mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. 2) Teori Negosiasi Prinsip, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: a) Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. b) Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak. 3) Teori Kebutuhan Manusia. Teori konflik ini berasumsi bahwa konflik yang disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia baik fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: a) Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. b) Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak. 4) Teori Identitas. Bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: a) Melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami

konflik mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka. (b) Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak. (5) Teori Kesalahpahaman Antar Budaya. Bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain; Mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain; Meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya. (6) Teori Transformasi Konflik. Bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: a) Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi. b) Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik. c) Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.

Teori penyebab konflik yang relevan dengan konflik sosial antara masyarakat RW 04 Desa Ciburial dengan kafe Erginn adalah: 1) Teori hubungan masyarakat, menurut teori ini konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik dan mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. 2) Teori kebutuhan manusia. Teori konflik ini berasumsi bahwa konflik yang disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia baik fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: a) membantu pihak-pihak yang

mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, b) Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak. 3) Teori transformasi konflik, bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: a) Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi, b) Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik, c) Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model penguatan kapasitas forum komunikasi warga RW 04 dalam penanganan konflik sosial dengan subproblematik sebagai berikut: 1) Bagaimana profil forum komunikasi warga RW 04 dalam penanganan konflik sosial, 2) Bagaimana aktivitas forum komunikasi warga dalam penanganan konflik sosial pada tahapan pencegahan dan penghentian, 3) Bagaimana rancangan model penguatan forum komunikasi warga RW 04 dalam penanganan konflik sosial, 4) Bagaimana implementasi model penguatan forum komunikasi warga RW 04 dalam penanganan konflik sosial, (5) Bagaimana hasil implementasi model penguatan forum komunikasi warga RW 04 dalam penanganan konflik sosial, 6) Bagaimana model akhir penguatan forum komunikasi warga RW 04 dalam penanganan konflik sosial.

Metode

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengembangkan hal yang sangat spesifik

dengan menggunakan pendekatan kolaborasi dengan masyarakat untuk menemukan model baru yang dapat mengatasi permasalahan di lokasi penelitian. Sugiyono (2008) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada latar alamiah. Masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif diri kolektif yang dilakukan oleh peserta dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan sosial mereka, serta pemahaman mereka terhadap situasi tempat praktik-praktik tersebut dilakukan (Carr & Kemmis, 1986 dalam Madya, 2011). Penelitian tindakan mempunyai maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. Seluruh proses diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengaruh telah menciptakan hubungan yang diperlukan antara evaluasi diri dan perkembangan profesional (Elliot, 1982 dalam Madya, 2011)

Penelitian tindakan mempunyai empat aspek pokok, menyusun rencana tindakan bersama-sama, bertindak dan mengamati secara individu dan bersama-sama, melakukan refleksi bersama-sama dan merumuskan kembali rencana berdasarkan informasi yang lebih lengkap dan lebih kritis (Kemmis dkk, 1982; Burns, 1999 dalam Madya, 2011). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan merupakan sebuah penelitian yang dilakukan secara partisipatif mulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan refleksi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tindakan yang telah dilakukan sebelumnya di lokasi penelitian. Pada penelitian ini peneliti telah melakukan penelitian siklus pertama pada penelitian. Hasil dari penelitian awal dijadikan sebagai baseline penelitian.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 1) Wawancara mendalam (*In-depth*

Interview), 2) Observasi partisipatif, 3) Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*), 4) Studi dokumentasi, (5) ToP (*Technology of Participation*), (6) Teknik penilaian kapasitas (PEKA). Sedangkan pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui cara-cara yang ditempuh yaitu: 1) Uji kredibilitas data yang meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, 2) Uji *transferability* (*validasi eksternal*), 3) Uji *dependability* (*reliabilitas*), (4) Uji *confirmability* (*obyektivitas*). Untuk analisis data dilakukan melalui teknik analisis kualitatif dengan model teknik analisis interaktif. Teknik analisis interaktif terdiri dari tiga komponen: reduksi data, display data, penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Lokasi

Desa Ciburial memiliki luas wilayah ±599.216 Ha yang terbagi menjadi 3 dusun, yakni 12 RW, dan memiliki 51 RT yang tersebar diantara daerah perbukitan. Secara topografis Desa Ciburial, merupakan daerah dataran tinggi, yang berbukit-bukit dengan ketinggian antara 750-1200 m (dpl). Suhu udara rata-rata 25°C-29 °C dan curah hujan tahunan, menjadi 0,29 mm/tahun. Batas-batas wilayah Desa Ciburial yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cigadung, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lembang, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekar Saluyu. Orbitase (jarak tempuh) dari pusat Desa Ciburial ke pusat Kecamatan Cimenyan adalah 12 Km yang dapat ditempuh dengan angkutan umum (angkot) dan ojek. Jarak tempuh ke pusat Kabupaten Bandung adalah 35 km dan jarak tempuh ke pusat Kota Bandung 10 km. Dengan jarak tempuh yang sangat jauh dengan pusat pemerintahan kabupaten maka warga harus terbebani dengan biaya transportasi yang mahal apabila harus mengurus administrasi baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Ketiadaan sarana transportasi massal membuat masyarakat tergantung kepada ojek.

Di Desa Ciburial lokasi konflik sosial berada di dusun I RW 4 kampung Sekebuluh, sedangkan yang rawan potensi konflik di dusun III yaitu RW 9 kampung sekejolang dan RW 10 kampung Babakan Ciharegem. Berdasarkan data profil Desa Ciburial dapat diketahui bahwa jumlah penduduk sebanyak 12.034 jiwa terdiri dari laki-laki sejumlah 6.324 dan perempuan 5.710, sedangkan untuk jumlah Kepala Keluarga sebanyak 3.529 KK. Data monografi Desa Ciburial menjelaskan jumlah penduduk usia produktif sekitar >26-30 dan terbilang yang paling banyak sekitar 2.315 jiwa, Sedangkan potensi kelompok rentan seperti anak-anak yang kategorinya masih usia sekolah dasar, sebanyak 883 serta 1.040 orang lanjut usia, tentu hal ini menjadi perhatian sendiri oleh Desa, sebab ketika terjadi bencana alam dan bencana sosial, yang menjadi pusat perhatian pertama adalah kelompok rentan.

Profil Forum Komunikasi Warga RW 04 Desa Ciburial

Forum komunikasi warga adalah sebuah wadah yang didirikan oleh masyarakat di RW 04 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Kelompok ini didirikan bulan September 2015 sebagai bentuk dan kepedulian masyarakat atas masalah konflik sosial. FKW merupakan organisasi yang didirikan oleh warga RW 04 Desa Ciburial dalam penanganan konflik sosial yang terjadi antara masyarakat RW 04 dengan Kafe Erginn.

Menurut Netting dalam Edi Suharto (2007) mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok individu yang berkumpul secara bersama-sama, untuk menyampaikan suatu tujuan yang khusus dalam organisasi kemasyarakatan yang memiliki orientasi untuk memperbaiki kualitas kehidupan anggotanya.

Pengertian organisasi sosial lebih menitikberatkan pada organisasi yang tumbuh dalam masyarakat. Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum yang fungsinya sebagai

sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa. Organisasi yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah komunitas juga bisa disebut sebagai organisasi sosial. Organisasi yang muncul secara sadar yang didasari aspirasi, prakarsa, dan swadaya masyarakat. Organisasi lokal umumnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah-masalah yang ada di masyarakat agar kehidupan di masyarakat dapat berlangsung secara terus menerus.

1. Alur Sejarah FKW RW 04

Forum komunikasi warga dibentuk pada bulan September 2015 oleh masyarakat RW 04 Desa Ciburial yang memiliki tugas mengawal ijin kafe agar tidak diperpanjang dan melapor dan membuat surat pengaduan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

2. Refleksi Pencapaian Tujuan FKW RW 04

Tujuan FKW RW 04 adalah: a) Menjadi wadah secara khusus yang terorganisir dalam penanganan konflik sosial di RW 04 desa Ciburial, b) Pengawasan perijinan kafe agar tidak diperpanjang kembali dan kafe tutup ke kantor Kecamatan Cimendan dan Kantor Perijinan serta Satpol PP Kabupaten Bandung, c) Pembuatan laporan keberatan warga tentang kafe Erginn melalui FKW RW 04 Desa Ciburial ke Kantor Camat Cimendan, Kepala perijinan, Satpol PP, Bupati Bandung, Polres Bandung dan kodim 0609 Cimahi, d) Kegiatan pembekalan dan pelatihan tentang pendidikan perdamaian, manajemen konflik dan advokasi dari praktisi hukum LBH Bandung.

3. Penilaian Kapasitas Kemampuan FKW RW 04.

Untuk mengetahui kapasitas kemampuan forum komunikasi warga (FKW) RW 04 Desa Ciburial dalam penanganan konflik sosial, peneliti melakukan asesmen awal dengan menggunakan teknologi Penilaian Kapasitas (PEKA) forum komunikasi warga (FKW) RW 04 Desa Ciburial. Aspek-aspek Penilaian Kapasitas (PEKA): a) Bidang Kepengurusan dan Keanggotaan, b) Bidang Kepemimpinan,

c) Bidang Administrasi dan Keuangan, d) Kemampuan sumber daya manusia, e) Pengelolaan kegiatan/program, f) Hubungan Organisasi dengan pihak lain, g) Bidang Keberlanjutan Organisasi.

4. Hasil Penilaian Kapasitas FKW RW 04

Pada aspek bidang organisasi yang mendapatkan nilai kecil yaitu hubungan dengan pihak lain. Bidang keberlanjutan organisasi masih lemah karena belum membangun jejaring. Kekuatannya adalah pada kerja sama antar pengurus walaupun jumlahnya hanya 5 (lima) selama ini mampu menjalankan aktivitasnya ke depan perlu dibangun recommitmen para pengurus untuk menciptakan harmonisasi di level kepengurusan. Perlu membuat program kerja yang terukur, membangun jejaring dengan lembaga yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial agar organisasi bisa tetap bertahan. Untuk empat bidang sudah memiliki skor yang baik yaitu kepengurusan dan anggota, kepemimpinan, kemampuan SDM organisasi, administrasi keuangan dan pengelolaan kegiatan dengan mendapatkan nilai baik. Namun begitu ada beberapa aspek dalam semua bidang yang masih harus dikembangkan diantaranya aspek aturan organisasi, hubungan dengan pihak lain dan aktif dalam perkumpulan, keberlanjutan organisasi dan administrasi dan keuangan.

Aktivitas yang Dilakukan oleh FKW RW 04 Desa Ciburial dalam Penanganan Konflik Sosial

1. Tahapan pencegahan. Pencegahan konflik merupakan serangkaian kegiatan untuk mengelola konflik pada tahap awal agar dapat mencegah konflik sehingga tidak menjadi tindakan kekerasan. FKW RW 04 dapat melaksanakan kegiatan pencegahan konflik antara lain: a) Upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, b) Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, c) Meredam potensi konflik; dan membangun sistem peringatan dini, d) Membangun sistem peringatan dini. 2. Tahapan penghentian. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban adalah suatu upaya penyelamatan dan

perlindungan korban konflik dengan maksud; meminimalisir jumlah korban, memberikan rasa aman, menghilangkan trauma, dan memberikan layanan yang dibutuhkan bagi korban. Kegiatan yang dilakukan: a) Identifikasi korban konflik secara cepat dan tepat, b) Perlindungan terhadap kelompok rentan.

Rancangan Model Penguatan Kapasitas FKW RW 04 dalam Penanganan Konflik Sosial di Desa Ciburial

Analisa hasil penilaian kapasitas diketahui bahwa permasalahan organisasi yang harus diperbaiki antara lain; organisasi belum memiliki aturan tertulis yang selalu dijalankan oleh seluruh anggota organisasi, pemimpin belum memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada anggota secara periodik (bulanan, tiga bulanan, atau tahunan). Organisasi belum memiliki kerjasama yang luas dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan yang saling menguntungkan. Organisasi belum mempunyai cara berbagi informasi dengan pihak lain misalnya melalui pertemuan dalam forum/jaringan, pameran. Organisasi belum mempunyai rencana kerja tertulis dan dilaksanakan sesuai rencana, Organisasi belum mempunyai kegiatan/program tahunan yang tertulis untuk mencapai tujuan organisasi, Organisasi belum menyusun rencana pengembangan pengetahuan dan ketrampilan bagi pengurus dan anggota sesuai kebutuhan organisasi.

Permasalahan-permasalahan diatas kemudian dibuatkan prioritas penyelesaiannya melalui diskusi dengan pengurus dan anggota FKW RW 04. Setelah menentukan prioritas dan mengklasifikasikannya, permasalahan utama adalah kapasitas organisasi yang masih lemah dalam hal penyusunan perencanaan program kegiatan, manajemen, dan administrasi serta jejaring yang masih terbatas. 1) Nama Kegiatan, Nama Program: "Penguatan Kapasitas FKW RW 04 dalam Penanganan Konflik Sosial melalui Pelatihan Manajemen Organisasi". Kegiatan: a) Pelatihan penyusunan rencana kerja organisasi. b) Pelatihan manajemen dan administrasi. c)

Pelatihan membangun jejaring kerja dalam penanganan konflik sosial. d) Pelatihan manajemen konflik dan advokasi sosial. 2) Tujuan Kegiatan: a) Penguatan kapasitas FKW RW 04 dalam penanganan konflik sosial di Desa Ciburial. b) Tersedianya rencana kerja organisasi. c) Adanya aturan manajemen administrasi FKW RW 04. d) Adanya jejaring kerja dalam penanganan konflik sosial. e) Mendapatkan pelatihan manajemen konflik dan advokasi sosial. 3) Langkah-langkah kegiatan sebagai berikut: (a) Membuat rencana kerja FKW RW 04 bersama para pengurusnya. b) Melakukan pelatihan manajemen administrasi. c) Melakukan pelatihan membangun jejaring kerja dalam penanganan konflik sosial.(d) Melakukan pelatihan manajemen konflik dan advokasi sosial. 4) Indikator Keberhasilan: a) Adanya dokumen tentang rencana kerja organisasi jangka pendek dan panjang. b) Tersedianya dokumen aturan manajemen dan administrasi secara tertulis. c) Adanya pemahaman tentang jaringan kerja penanganan konflik sosial yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012. d) Dapat memahami konflik, alat bantu untuk menganalisis situasi konflik, strategi mengelola konflik serta mempengaruhi kebijakan. 5) Metode dan Teknik yang digunakan: (a) Metode *Community Work*. b) Pendekatan *Locality Development*. c) Strategi Kolaborasi. d) Taktik Penguatan kapasitas, pendidikan dan persuasi. (e) Teknik sosialisasi, papat pleno dan audiensi

Rancangan Model Penguatan Kapasitas FKW RW 04 dalam Penanganan Konflik Sosial di Desa Ciburial Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung.

Input (Masukan): FKW RW 04 masih memiliki keterbatasan dalam: perencanaan program, manajemen dan administrasi, pengembangan jejaring terbatas, manajemen konflik sosial dan advokasi sosial.

Proses Kegiatan: Penguatan kapasitas FKW RW 04 pada: Perencanaan program, manajemen dan administrasi, Pengembangan jejaring terbatas, Manajemen konflik sosial dan advokasi sosial.

Output (Keluaran): FKW RW 04 sudah ada peningkatan dalam: a) Pengurus mempunyai rencana strategis organisasi, b) Mampu membangun jejaring dengan sistem sumber, c) Mampu membuat laporan organisasi, Mampu bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah yang terkait dengan penanganan konflik sosial, d) Keterlibatan pengurus bertambah.

Outcome (Hasil): FKW RW 04 telah berkembang dengan ditandai oleh: a) Masyarakat mendapatkan manfaat dalam kegiatan, b) Mempunyai rencana kerja startegis jangka pendek dan panjang, c) Mampu membuat laporan administrasi keuangan dan proposal kegiatan, d) Rencana kerja sudah mulai dilaksanakan, e) Administrasi dan keuangan sudah mulai tertib, f) Jaringan sudah mulai terhubung dengan LBH Bandung, Kesbangpol, Satpol PP, Dinas Sosial, Polres, Kodim 0609 Cimahi.

Refleksi: a) FKW RW 04 mampu berkembang dan membangun jejaring dengan LBH Bandung, Kesbangpol, Satpol PP, Dinas Sosial, Polres, Kodim 0609 Cimahi. b) Pengurus yang aktif bertambah dan tetap semangat dengan kegiatan yang ada.

Implementasi Model Penguatan Kapasitas FKW RW 04 dalam Penanganan Konflik Sosial di Desa Ciburial

Perencanaan penguatan kapasitas FKW RW 04 dalam penanganan konflik sosial ini dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan teknik asesmen PEKA. Adapun implementasi perencanaan penguatan kapasitas FKW RW 04 dalam penanganan konflik sosial, kegiatan yang dilakukan adalah: 1) Pelatihan pembuatan rencana kerja organisasi. Pada 3 April 2016 jam 19.00 selesai. Materi: Pelatihan pembuatan rencana kerja organisasi, disampaikan oleh Kamrujjaman M.Si. Metode: workshop, ceramah, diskusi kelompok. 2) Pelatihan manajemen dan administrasi. Pada 10 April 2016m materi; Pelatihan menejemen dan administrasi, disampaikan oleh Kamrujjaman M.Si. Metode ceramah, pembahasan kasus,

FGD. 3) Pelatihan manajemen konflik dan advokasi sosial. Pada 17 April 2016 materi: Manajemen konflik dan advokasi sosial, disampaikan oleh Irvan, Putra (aktivis LBH) Bandung. Metode: Ceramah, tanya jawab, pembahasan kasus. 4) Pelatihan membangun jejaring kerja dalam penanganan konflik sosial. Pada 24 April 2016, materi: Pelatihan membangun jejaring ke dalam penanganan konflik sosial, disampaikan oleh Kamrujjaman, M.Si dengan metode ceramah, pembahasan kasus, tanya jawab.

Hasil Implementasi Model Penguatan Kapasitas FKW RW 04 dalam Penanganan Konflik Sosial di Desa Ciburial

(1) Re-assessment dilakukan dengan menggunakan teknologi Penilaian Kapasitas PEKA FKW RW 04. (2) Pelaksanaan Kegiatan: a) Membuat Rencana Kerja Organisasi. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan arah kejelasan bertindak bagi organisasi. Organisasi harus mempunyai arah tujuan yang akan dicapai yang diwujudkan dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Selain itu organisasi harus mempunyai tujuan dan kapan organisasi itu dibentuk. Kemampuan organisasi untuk bertahan melewati fase tumbuh dan berkembang, matang kemudian pecah atau bubar. b) Pelatihan manajemen dan administrasi FKW RW 04. Materi yang dibahas dalam pelatihan ini adalah mengenai dinamika organisasi yang terkait dengan masalah manajerial dan administrasi lembaga serta pelaporan keuangan seperti: arus masuk keluar dana melalui buku kas, bagaimana membuat laporan keuangan secara sederhana, pencatatan laporan keuangan, belanja barang dan bukti belanja, bagaimana memahami alur dalam laporan keuangan yang bisa dipertanggung jawabkan, etika dan nilai transparansi anggaran. c) Pelatihan membangun jejaring kerja dalam penanganan konflik sosial. Membangun jejaring kerja merupakan sebuah kerja sama belajar dimana masing-masing lembaga dapat berbagi pengalaman buruk dan terbaik dalam penanganan konflik sosial serta berkoordinasi antar lembaga disesuaikan dengan tugas pokok lembaga tersebut, sehingga permasalahan sosial dapat segera

diselesaikan dengan damai. d) Pelatihan manajemen konflik dan advokasi sosial. Teknik pelatihan dengan menggunakan metode POD (Pendidikan Orang Dewasa). Kegiatan diawali dengan pertanyaan: Mengapa kita harus memahami konflik, teori-teori yang menyebabkan konflik? Apakah analisis konflik, alat bantu untuk menganalisis konflik? Apakah konflik bisa dikelola?, kemudian dilanjutkan diskusi tentang penanganan kasus oleh Lembaga Bantuan Hukum Bandung.

Hasil implementasi kegiatan penguatan kapasitas FKW RW 04 dalam penanganan konflik sosial di Desa Ciburial menghasilkan beberapa hal yaitu: a) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan pengurus dalam membuat rencana kerja jangka pendek dan panjang sesuai dengan visi dan misi. b) Mampu membuat manajemen dan administrasi, pelaporan dan pembuatan aturan tertulis, rencana kerja tertulis dan pelaporan keuangan dan laporan kegiatan secara tertulis dan berkala. c) Mampu memahami konflik, mampu menggunakan alat bantu untuk menganalisis situasi konflik, memahami strategi mengelola konflik serta mempengaruhi kebijakan sosial. d) Peningkatan jejaring kerja dan pembuatan laporan serta permohonan bantuan ke lembaga non pemerintah lembaga bantuan hukum (LBH) Bandung, membangun kerjasama dengan Kesbangpol, Satpol PP, Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP), Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Penanganan konflik sosial akan lebih efektif dilakukan dengan menggunakan pendekatan inisiatif dari bawah. Inisiatif lokal yang berasal dari masyarakat langsung bersifat sangat "genuine". Inisiatif lokal diawali dari tumbuhnya kesadaran (*consciousness raising*) dari individu yang mengalami kesadaran individu bersama individu yang lain melakukan tindakan kolektif yang terlembagakan dalam bentuk organisasi lokal atau forum. Sudah seharusnya pihak pemerintah mendorong dan mendukung gagasan ini dengan memberikan perhatian dalam bentuk *capacity building* kepada FKW RW 04 untuk implementasi kegiatan.

Bentuk peningkatan kapasitas organisasi menurut Uphoff (1986) adalah: 1) Memberikan dukungan berupa: a) Asistensi, fasilitasi dan promosi. b) Pendekatan proses belajar, pendekatan ini menempatkan para ahli sebagai pendesign program dan yang kurang ahli diberikan kesempatan untuk implementasi program. 2) Pengembangan Kapasitas Manusia. Penguatan institusi lokal membutuhkan perhatian tertentu kepada aspek manusia dalam kapasitas institutional; pendekatan baru untuk pelatihan dan penguatan kepemimpinan.

Menurut OCCA (*Organisasi Capacity Assessment*) menyatakan bahwa peningkatan kapasitas organisasi lokal difokuskan pada aspek: a) Manajemen sumber daya manusia. b) Manajemen sumber daya keuangan. c) Hubungan keluar. d) Pembelajaran organisasi. e) Tata kelola.

Hasil dari implementasi teori OCCA (2006) dan Uphoff (1986) adalah:

(1) Pelatihan pembuatan rencana kerja bagi FKW RW 04. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya program kerja selama satu tahun, penetapan visi dan misi organisasi, tujuan organisasi baik jangka pendek menengah maupun jangka panjang. Rencana kerja organisasi berfungsi sebagai arah bagi organisasi melakukan kegiatannya, sehingga dengan adanya perencanaan kegiatan ini memandu organisasi untuk tetap berjalan sesuai dengan mandat lembaga yaitu mengawal dan memastikan perijinan kafe Ergin tidak diperpanjang kembali dan melaporkan serta membuat surat keberatan ijin usaha kafe kepada pihak terkait dengan penanganan konflik sosial. Program ini adalah inisiatif lokal dari masyarakat yang genuine untuk melakukan perubahan sosial dalam penanganan konflik sosial masyarakat RW 04 Desa Ciburial dengan pihak kafe Erginn. Sejalan dengan ini menurut CDRA (Community Development Resources Association) dalam buku *To Working with Organization and Social* terbitan CIDA (2009:9):

"Ketika orang biasa mampu menciptakan mengaitkan dan memperkuat organisasi mereka sendiri dan melalui organisasi mereka

dapat menyuarakan dan melakukan tindakan yang mereka pikirkan, rasakan dan inginkan, mereka mendapatkan kekuasaan lebih atas pilihan dan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Bagi jutaan manusia yang hidup dalam kemiskinan dan yang hak dasarnya sebagai manusia tidak terpenuhi organisasi akan memberikan perbedaan masa depan mereka”.

(2) Pelatihan manajemen dan administrasi. Sebagai sebuah organisasi yang baru tumbuh maka diperlukan pengelolaan agar organisasi ini bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pelatihan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi pengurus untuk melakukan masalah manajerial dan administrasi lembaga serta pelaporan keuangan seperti: arus masuk keluar dana melalui buku kas, bagaimana membuat laporan keuangan secara sederhana, pencatatan laporan keuangan, belanja barang dan bukti belanja, bagaimana memahami alur dalam laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan, etika dan nilai transparansi anggaran. FKW RW 04 wajib memiliki laporan yang akuntabel dan dapat dipercaya yang bisa diakses oleh siapapun.

(3) Pelatihan membangun jejaring kerja dalam penanganan konflik sosial. Jejaring dengan sistem sumber memberikan manfaat bahwa tidak organisasi yang bisa hidup sendiri tanpa memiliki ketergantungan dengan lembaga lain. Ada kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi oleh organisasi, sehingga organisasi membutuhkan jejaring untuk saling bekerjasama. Kerjasama harus sejalan dengan prinsip *take and give* dan dibangun dengan kesetaraan (*egalitarian model*) bukan model *donor to donor*. Pengembangan jaringan FKW RW 04 dengan sistem sumber telah menghasilkan tambahan jaringan kerja yang dapat bermanfaat untuk memobilisasi sumber. Freeman (2011) mengatakan bahwa model *competence paradigm* juga tujuannya dapat membantu masyarakat untuk memanfaatkan sumber yang ada dan menciptakan dan memobilisasi sumber tambahan. Selain itu, pengembangan jaringan juga merupakan salah satu cara untuk menyadarkan pemerintah. Freeman (2011) mengatakan bahwa tugas utama lembaga pemerintah adalah untuk menginstistusikan model penanganan konflik

sosial dengan menyertakan model ini dalam rencana strategis jangka panjang, kebijakan, proses pelatihan dan sistem pelayanan langsung.

(4) Pelatihan manajemen konflik dan advokasi sosial, bertujuan untuk memberikan pengetahuan berkaitan konflik dan memahami konflik, alat bantu untuk menganalisis situasi konflik, strategi mengelola konflik serta mempengaruhi kebijakan sosial. Dilanjutkan dengan diskusi tentang pengalaman penanganan kasus ole LBH yang berhasil sehingga pengurus memiliki semangat bahwa kasus ini bisa diselesaikan dengan cara damai.

Refleksi

FKW RW 04 kini sudah berubah dari organisasi yang awalnya memiliki beberapa keterbatasan kini sudah mulai tumbuh kembang sebagai organisasi penanganan konflik sosial, namun ada beberapa catatan ke depan yakni: 1) FKW masih membutuhkan pendampingan bertahap untuk bisa menjadi organisasi yang berkelanjutan. 2) Kepemimpinan FKW RW 04 membutuhkan tantangan untuk terus terdepan dalam penanganan konflik dari tingkat desa hingga sampai kabupaten. 3) Jejaring kerja yang sudah terjalin harus dirawat oleh pengurus FKW RW 04 agar semakin kuat.

Pendekatan pembangunan yang selalu menekankan dari atas (*top down*) banyak sekali menuai gugatan, pendekatan baru yang dirasakan sangat *genuine* dan berasal dari inisiatif dari bawah (*bottom up process*) dirasakan sebagai sebuah kebutuhan yang bisa menjawab lebih tepat dengan persoalan yang dialami oleh masyarakat. Di sini, kata kuncinya adalah partisipasi (keterlibatan) dan munculnya kesadaran kritis untuk melakukan aksi kolektivitas. Masyarakat yang sadar kemudian membentuk wadah atau forum kelembagaan yang berakar dari kesadaran individu dirasakan lebih tepat, fungsi pemerintah adalah hanya memfasilitasi dan sebagai regulasi.

Penguatan FKW RW 04 pada bidang perencanaan strategis, pelatihan networking, manajemen, dan administrasi pelaporan, manajemen konflik serta advokasi sosial diharapkan akan menambah pengetahuan dan

keterampilan pengurus. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kapasitas organisasi untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Penguatan kapasitas FKW RW 04 melalui pelatihan manajemen organisasi sejalan dengan teori penguatan kapasitas (*capacity building*) sebagaimana dinyatakan oleh Sumpeno (2002): penguatan kapasitas merupakan suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi, dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien, merujuk pada pernyataan ini maka menurut Sumpeno (2002) penguatan kapasitas berarti terjadi perubahan perilaku untuk: 1) Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, ketrampilan dan sikap. 2) Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen, keuangan dan budaya. 3) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan dan mengantisipasi perubahan.

Pernyataan di atas mempunyai relevansi dengan program intervensi yang dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas FKW RW 04 dalam penanganan konflik sosial masyarakat RW 04 dengan kafe Erginn. Hasil dari penguatan kapasitas bagi FKW RW 04 adalah meningkatkan pemahaman, pengetahuan para pengurus organisasi dalam menjalankan aktivitas kelembagaan yang lebih terarah dan mempunyai kelembagaan yang kuat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Sumpeno (2002) yang menyatakan bahwa hasil dari penguatan kapasitas organisasi adalah: 1) Penguatan individu, organisasi, dan masyarakat, 2) Terbentuknya model pengembangan kapasitas dan program, 3) Terbangunnya sinergitas pelaku dan kelembagaan.

Analisis SWOT

Kekuatan (*strength*): a) Kekompakan diantara pengurus bisa menjadi semangat bagi organisasi untuk lebih berkembang. b) Latar belakang pendidikan yang lebih baik dari para pengurus sebagai modal organisasi untuk peningkatan kapasitas. c) Keinginan yang kuat untuk senantiasa belajar dan

meningkatkan kapasitas diri. d) Kepemimpinan yang mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. e) Dukungan dari pihak desa dan kecamatan terhadap FKW RW 04.

Kelemahan (*weakness*): a) Kemampuan dalam membangun jejaring kerja masih lemah. b) Jumlah pengurus yang aktif sedikit. c) Belum memiliki kemampuan pembuatan laporan dan administrasi yang baik.

Peluang (*opportunity*): a) FKW RW 04 mendapatkan dukungan penuh dari pemerintahan Desa Ciburial dan pemerintah Kecamatan, terutama Satpol PP Kecamatan. b) Mendapatkan dukungan dari KESBANGPOL dan SATPOL PP, Kantor Perijinan (BPMP) Kabupaten Bandung. c) Mendapat dukungan dan adanya kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. (d) Mendapat pelatihan manajemen konflik dan advokasi sosial dari LBH Bandung. (e) Mendapatkan pelatihan dari Dinas Sosial. (f) Mendapat dukungan dari Polres Bandung dan Kodim 0609 Cimahi.

Ancaman (*threat*): a) Organisasi baru tumbuh. b) Lokasi konflik merupakan desa wisata dan merupakan daerah pinggiran, yang berbatasan dengan Kota Bandung, jauh dari pengawasan pemerintahan Kabupaten Bandung. (c) Manajemen organisasi masih lemah.

Strategi model analisis yang relevan dapat dilakukan setelah melakukan analisis SWOT yaitu: 1) Meningkatkan Kekuatan (*Strength*) dan Peluang (*Opportunity*) dengan teknik diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan ditingkatkannya intensitas pertemuan anggota pengurus sehingga memudahkan koordinasi dan meningkatkan jejaring sosial serta melakukan studi banding ke lembaga penanganan konflik sosial di Bandung, seperti Ombusmand, LBH Bandung. 2) Meminimalkan Ancaman (*Threat*) dan Kelemahan (*Weakness*). Organisasi baru tumbuh, manajemen organisasi masih lemah, dan kemampuan dalam membangun jejaring kerja masih kurang. Hal ini bisa diatasi dengan adanya pendampingan oleh

pendamping dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung yaitu pemuda pelopor perdamaian. Pendamping pemuda pelopor perdamaian merupakan tenaga yang terdidik dan terlatih serta memiliki pengetahuan dan keterampilan serta jaringan di tingkat kabupaten yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial.

Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi praktis merupakan sebuah konsekuensi dari hasil temuan selama penelitian. Implikasi praktis memiliki tujuan untuk memperkaya praktik pekerjaan sosial sehingga pembaca akan mendapat gambaran yang jelas tentang penelitian di sebuah tempat mulai dari proses sampai pada hasil penelitian dan refleksi akhir. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan mempunyai dampak positif bagi penguatan kapasitas adalah: 1) Kegiatan restrukturisasi kelembagaan FKW RW 04 sebagai bagian penguatan kelembagaan berdampak pada pengelolaan lembaga. Penguatan kelembagaan FKW RW 04 mendapat dukungan penuh dari Kepala Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan dengan terlibatnya langsung masuk pada jajaran pengurus FKW RW 04 sebagai penanggung jawab umum. Hal ini berarti terjadi peningkatan partisipasi yang dahulu dalam penanganan permasalahan konflik sosial yang terlibat hanya 3 (tiga) orang yaitu Kepala Desa, Ibu Kokom Ketua RW dan Pak Usep H sebagai Ketua RT 04, sedangkan sekarang sudah terbentuk kepengurusan baru yang terlibat sudah 14 orang yang masing-masing memiliki tugas pokok. 2) Kegiatan serangkaian pelatihan seperti penyusunan program rencana kerja baik jangka panjang, menengah atau jangka panjang, pengelolaan manajemen dan administrasi pelaporan keuangan, pelatihan manajemen konflik dan advokasi sosial serta pelatihan membangun jaringan kerja dalam penanganan konflik sosial berdampak positif pada penguatan kelembagaan FKW RW 04. Manajemen dan administrasi pelaporan keuangan membuat pengurus mampu membuat pelaporan atau surat menyurat kepada lembaga lain serta lahirnya transparansi dan akuntabilitas lembaga. Kegiatan membangun jaringan kerja dalam penanganan konflik sosial menghasilkan kerjasama FKW RW 04

dengan Lembaga Bantuan Hukum Bandung yang terwujud adanya pelatihan manajemen konflik dan advokasi sosial. 3) Keberadaan FKW RW 04 dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya dalam hal penanganan konflik sosial di Desa Ciburial diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada kafe yang tidak memiliki ijin atau ijin yang tidak sesuai dan juga dapat menutup kafe-kafe lain yang menjalankan usaha ilegal seperti kafe Erginn di Desa Ciburial.

Implikasi teoritis. Penelitian ini membuktikan asumsi-asumsi Uphoff bahwa (1986) tentang kelembagaan di tingkat mikro. Penelitian ini membuktikan beberapa kebenaran untuk kasus FKW RW 04. Uphoff mengusulkan lima dukungan alternatif buat lembaga lokal yakni bentuk dukungan orang luar, pengembangan kapasitas SDM, pengembangan jaringan, restrukturisasi institusi, dan penguatan kapasitas institusi. Namun ada beberapa catatan dalam pelaksanaan di lapangan. Dukungan orang luar tetap diperlukan karena bila lembaga lokal tidak mendapat dukungan dari orang luar maka pengalaman ini membuktikan bahwa lembaga tersebut tidak dapat berkembang optimal. Dukungan orang luar bisa saja berupa jejaring, peluang penggalangan dukungan massa. Ada kecenderungan lembaga tanpa dukungan dari luar kecepatan memanfaatkan akses ke berbagai bidang terbatas. Setidaknya dengan adanya dukungan orang luar membuat lembaga lokal seperti FKW RW 04 menjadi dinamis. Pengembangan kapasitas SDM terbukti di lapangan memang FKW RW 04 perlu melakukan pengembangan kapasitas agar bisa mencapai tujuan lembaga. Uphoff dalam hal ini tidak menyarankan secara detail alat yang digunakan. Pada penelitian ini digunakan alat pengukuran kelembagaan PEKA. Dengan alat ini beberapa komponen kapasitas SDM dapat diketahui tingkatnya secara kuantitatif berdasarkan skala yang digunakan seperti amat buruk, sedang, baik, amat baik. Penggunaan alat ini kiranya dapat menjadi catatan bagi teori Uphoff. Pengembangan jaringan pada penelitian ini membuktikan bahwa FKW RW 04 membutuhkan perluasan jaringan dan dukungan dari pihak luar khususnya yang

berkaitan dengan penanganan konflik sosial. Bagi FKW RW 04 jaringan adalah investasi bagi pengembangan ke depan. Namun FKW RW 04 belum menyadari sepenuhnya bahwa jaringan bukan sebatas kenal, tapi juga sebuah investasi yang diwujudkan dengan kerjasama dan dukungan untuk penyelesaian konflik secara cepat dan damai, hubungan yang profesional dalam penanganan konflik sosial. Perihal restrukturisasi organisasi amat disadari oleh FKW RW 04 bahwa organisasi sesuai dengan mandate sosialnya harus menjawab persoalan yang digeluti dan menjadi misi FKW RW 04 untuk mengawal dan memastikan perijinan kafe Ergin tidak diperpanjang, melaporkan dan membuat surat keberatan ijin usaha kafe kepada kepala perijinan satu atap Kabupaten Bandung serta pemberian pembekalan dan pelatihan tentang menghadapi konflik sosial kepada FKW RW 04. Struktur lembaga yang menangani konflik sosial awalnya belum terbentuk hanya dilaksanakan oleh aparat tingkat desa yang tidak memiliki program kerja maka direstrukturisasi dan dibentuk FKW RW 04 yang memiliki tujuan dan tugas masing-masing.

Penelitian ini juga membuktikan asumsi-asumsi Simon Fisher (2001:8) bahwa penyebab konflik sosial di RW 04 Desa Ciburial dengan pihak kafe Erginn adalah: (1) Teori kebutuhan manusia. Teori konflik ini berasumsi bahwa konflik yang disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia baik fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: a) Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. b) Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak. (2) Teori Hubungan Masyarakat. Teori ini beranggapan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan, dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda-

beda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: a) Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik. b) Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih terbiasa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. (3) Teori transformasi konflik: Bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah: a) Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi. b) Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik. c) Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.

Penyebab konflik ini awalnya adalah kebutuhan dasar masyarakat RW 04 akan rasa aman yang tidak terpenuhi. Selama kehadiran kafe Erginn di masyarakat RW 04, masyarakat merasa hidup tidak aman, tidak tenang, tidak tenteram, terganggu oleh aktivitas kafe dan suara musik yang keras hingga larut malam serta gaduh para pengunjung kafe. Pertemuan dan kesepakatan sudah dibuat dan belum ada solusi untuk kedua belah pihak. Perbedaan pandangan antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan perijinan kafe maka munculah konflik. Kemudian jika dikaitkan dengan legalitas usaha kafe ini juga menjadi persoalan dengan penegakan hukum yang belum profesional. Adanya ketidakadilan di masyarakat dalam hal penegakan hukum yang tebang pilih.

Simpulan

Penelitian penguatan kapasitas FKW RW 04 dalam penanganan konflik sosial di Desa Ciburial Kecamatan Cimendan Kabupaten Bandung menyimpulkan beberapa hal: (1) Lembaga FKW RW 04 perlu penguatan di beberapa bidang sejalan dengan pemikiran

dan teori Uphoff (1986) tentang lembaga lokal diantara bentuk dukungan orang luar, pengembangan kapasitas SDM, pengembangan jaringan, restrukturisasi institusi, dan penguatan kapasitas institusi. (2) Dalam melakukan penguatan kelembagaan perlu digunakan alat penilai kelembagaan yakni PEKA. Hal ini dimaksud untuk lebih bisa memetakan sisi kuat dan lemahnya sebuah lembaga. Dengan pemetaan ini maka dapat diketahui dengan mudah intervensi yang akan dilakukan untuk penguatan lembaga FKW RW 04. (3) FKW RW 04 dianalisis dengan menggunakan teknologi PEKA untuk mendiagnostik kapasitas organisasinya yang terdiri dari 7 aspek kunci dalam organisasi yaitu: bidang kepengurusan, bidang kepemimpinan, bidang administrasi dan keuangan, bidang kemampuan sumber daya manusia, bidang kegiatan/program, bidang hubungan dengan pihak luar dan keberlanjutan organisasi. Hasilnya adalah secara umum FKW RW 04 lemah dalam hal kapasitas organisasi yang masih lemah karena masih baru dan baru tumbuh, sedangkan kekuatannya adalah pada aspek kepemimpinan dan semangat dari anggota. Program yang

diusulkan adalah penguatan kapasitas FKW RW 04 melalui pelatihan manajemen dan administrasi organisasi. Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan membuat rencana kerja organisasi jangka pendek, menengah, dan panjang, pelatihan manajemen dan administrasi pelaporan keuangan, pelatihan membangun jejaring kerja dalam penanganan konflik sosial dan pelatihan manajemen konflik dan advokasi sosial. (4) Model akhir yang merupakan penyempurnaan model sebelumnya merefleksikan bahwa FKW RW 04 kini sudah berubah dari organisasi yang pada awalnya memiliki beberapa keterbatasan kini sudah mulai tumbuh kembang sebagai FKW RW 04 dalam penanganan konflik sosial namun ada beberapa catatan ke depan yaitu: FKW RW 04 masih membutuhkan pendampingan secara bertahap untuk menjadi organisasi yang berkelanjutan. Kepemimpinan FKW RW 04 membutuhkan tantangan untuk terus terdepan dalam penanganan konflik dari tingkat desa, kecamatan hingga sampai kabupaten, Jejaring kerja yang sudah terjalin harus dirawat oleh pengurus FKW RW 04 agar semakin kuat.

Daftar Pustaka

- Edi Suharto. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Cetakan 5. Bandung: PT. Refika Aditama.
- 2010. *Analisis Kebijakan Publik. Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Cetakan 4. Bandung: CV. Alfa Beta.
- Dedi Kurniawan. Upaya Penanggulangan Konflik Sosial yang Terjadi di Lampung Selatan. *Jurnal.fh.Unila*. (2015) 422.
- Fisher, Simon dkk. 2001. *Mengelola Konflik. Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia.
- Ife, Jim. Tesoriero, Frank. 2008. *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Immanuel Hardjo Pradoto dan Wayan Tambun. 2005. PEKA: Panduan Menilai Kemampuan Organisasi Masyarakat (PEKA), (2005) ACCES Proje-AusAID, VECO Indonesia, Heifer International Indonesia, MFP dan KPMNT. Bali
- Isbandi Rukminto Adi. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Jaffee, David. 2001. *Organization Theory; Tension and Change*. USA: McGraw Hill.

- NASW. 2013. *Standards for Social Work Practice with Clients with Substance Use Disorders*. National Association of Social Workers.
- Netting, F Ellen, et.al. 2004. *Social Work Macro Practice*. Third Edition. Boston: Pearson Eductaion Inc.
- Payne, Malcolm. 2005. *Modern Social Work Theory*. 3rd Edition. New York: Palgrave Macmillan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Pruitt, Dea G, dkk. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwarsih Madya. 2011. *Penelitian Tindakan Action Research Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.